

**POHON KINERJA DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**DINAS PERBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

**Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan dan Perlindungan Anak**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) = 68%

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) = 4,5%

**Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk**

Total Fertility Rate (TFR) = 2,41%

**DINAS KESEHATAN**

**Meningkatnya Kesetaraan Ber KB**

Tingkat Prevalensi Kontrasepsi (CPR) = 61%

**ULTIMAT OUTCOME**

**INTERMEDIAT OUTCOME**

**IMMEDIAT OUTCOME**

**OUT COME**

**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan**

1. Persentase Perempuan di Parlemen = 10 %

2. Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional = 48 %

**Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan pemenuhan hak khusus anak**

Prevalensi kekerasan terhadap Anak = 0,068 %

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan Usia 15-64 Th = 0,014%

**Meningkatnya Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD**

Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD = 5,19%

**Meningkatnya Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO yang tertangani Sesuai Standar**

Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO yang tertangani Sesuai Standar = 100%

**Meningkatnya Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terpenuhi sesuai standar**

Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) yang terpenuhi sesuai standar = 45%

**Meningkatnya Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani Sesuai Standar**

Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani Sesuai Standar = 100%

**Meningkatnya Kampung KB Mandiri Berkelanjutan**

Persentase Kampung KB Mandiri Berkelanjutan = 55%

**Meningkatnya Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (Banga)**

Indeks Pembangunan Keluarga (Banga) = 54 %

**Meningkatnya Kepsetaraan Ber-KB (KB Aktif)**

Persentase Cakupan Kesetaraan KB Aktif = 60%

**Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas P3AKB**

Nilai Sakip OPD 56,53 (B)

**Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Kewenangan Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Pencegahan Terhadap Anak yang Melibatkan Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan rujukan lanjutan tertangani sesuai standar = 100%**

**Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**

**Tertaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

**Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Meningkatnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**

**Terwujudnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Melalui Media Cetak dan Elektronik = 100%**

**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komasyarakatan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB**

**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**

**Tertaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Tertaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota = 12 Lembaga

Jumlah Jejaring Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperhatikan peningkatan jumlah jejaring dan pemeliharaan di Lombok Timur = 12 Lembaga

Jumlah Korban Kekerasan yang memerlukan rujukan lanjutan tertangani sesuai standar = 100%

Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan yang terlatih = 4 Orang

Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha = 5 Lembaga

Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Anak Kewenangan = 2 Kegiatan

Jumlah Pencegahan PHA yang melibatkan pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota = 1 Kebijakan

Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan rujukan lanjutan tertangani sesuai standar = 100%

Jumlah Korban Kekerasan Pada Anak yang memerlukan rujukan lanjutan tertangani sesuai standar = 100%

Jumlah Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk = 1 Kebijakan

Tersedia profil Bangga Kencana di masing masing Balai Penyuluhan, = 21 Dokumen

Persentase Poktan (BKB, BKR, PKR, UPPKS) yang aktif = 70%

Pemantauan data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin / Kelahiran Baduta/Balita)

Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP), = 10.160 Orang

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK = 42 Laporan

Angka Pemakaian Kontrasepsi, CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun = 162.232 Orang

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi (Ummeet-Need) = 14,00%

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan = 1 Dokumen

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan = 1 Dokumen

Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah = 100%

Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah = 100%

Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah = 100%

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA

Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Sistem Informasi Keluarga

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin / Kelahiran Baduta/Balita)

Sasaran Sub Kegiatan : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana

Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB = 1 Laporan Rp. 3.840.000

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Pelaksanaan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota = 1 Dokumen

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota = 1 Dokumen

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan = 28 Orang

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas = 2 Orang

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha = 30 Organisasi

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota = 2 Dokumen

Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu = 5 Kegiatan

Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK, = 3 Orang

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan = 79 Orang

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Sistem Informasi Keluarga Kabupaten/Kota, = 1 Dokumen

Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan

Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), = 4 Laporan

Jumlah Kader yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana Pembinaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, = 62 Organisasi

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK = 42 Laporan

Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB = 1 Laporan

Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya = 6 Laporan

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD = 1 Dokumen

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan = 2 Unit

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan = 1 Laporan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = 8 Unit

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = 8 Unit

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = 8 Unit

Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memastikan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota = 28 Layanan

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota = 1 Dokumen

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan = 28 Orang

Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas = 2 Orang

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha = 30 Organisasi

Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota = 2 Dokumen

Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu = 5 Kegiatan

Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK, = 3 Orang

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan = 79 Orang

Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Sistem Informasi Keluarga Kabupaten/Kota, = 1 Dokumen

Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan

Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), = 4 Laporan

Jumlah Kader yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana Pembinaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, = 62 Organisasi

Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK = 42 Laporan

Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB = 1 Laporan

Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya = 6 Laporan

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD = 1 Dokumen

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan = 2 Unit

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan = 1 Laporan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = 8 Unit

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = 8 Unit

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya = 8 Unit

**Keterangan**

KINERJA →

CROSS CUTTING →